



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/Lembaga/pemerintah daerah;
- b. bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah mengalami perubahan dengan diundangkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, sehingga perlu melakukan penyesuaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b dan c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
 3. Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 4. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 196);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 612/ORT.04 - Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/Ort.07-Kpt/01/Kpu/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tambolaka
Pada tanggal 29 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARA DAYA,

ttd

HYRONYMUS MALELAK

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Hyronymus M. Nggala

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
 NOMOR 2 TAHUN 2026
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM REFORMASI
 BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA
 BARAT DAYA TAHUN 2026

KEANGGOTAAN TIM REFORMASI BIROKRASI
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TAHUN 2026

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
TIM PENGARAH				
1.	Hyronymus Malelak	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	- Mengkoordinasikan dan melakukan monitoring program Reformasi Birokrasi di lingkungan KPU Kabupaten Sumba Barat Daya Daya; dan - Memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dalam pelaksanaan program monitoring program Reformasi Birokrasi di lingkungan KPU Kabupaten Sumba Barat Daya Daya.
2.	Dickson Nix Yo Daly	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
3.	Yonathan Landi	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
4.	Fransiskus Bulu Ngongo	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
5.	Isak Carles Umbu Mimira	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
PELAKSANA				
1.	Agustinus Damma Renna	Sekretaris KPU Kabupaten	Ketua	Melakukan dan memberikan masukan

		Sumba Barat Daya Daya		kepada Tim Pelaksana mengenai program Reformasi Birokrasi di lingkungan KPU Kabupaten Sumba Barat Daya.
I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1.	Efraim Novrihansi Gadi, S.Si	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	- Menyusun Strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada KPU Kabupaten Sumba Barat Daya;
2.	Victor Sar Bally, S.H	Kepala Sub Bagian Parhubmas dan SDM	Anggota	- Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi;
3.	Kristoforus M. Nggala, S.Sos	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	- Dst.
4.	Yohanes B. W. Dosi Woda, S.IP., M. Kesos	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
II. TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN				
1.	Kristoforus M. Nggala, S.Sos	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota	- Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan KPU

2.	Ahmad Zulfikar Pical, S.H., M.H	Pelaksana pada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	Kabupaten Sumba Barat Daya; - Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan KPU Kabupaten Sumba Barat Daya; - Dst.
3.	Elton Jordan Ronaldo	Pelaksana pada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
4	Ilham Agustian Anhas	Pelaksana pada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
5	Akromul Hakiim Nashuha	Pelaksana pada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
III TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN				
1.	Efraim Novrihansi Gadi, S.Si	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi;
2.	Adi Afan Asy'ri, S.Kom	Pelaksana di Sub Bagian Perencanaan,	Anggota	

		Data dan Informasi		- Dst.
3.	George Reynaldi Koton, S.Kom	Pelaksana di Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
4	Ferdinand Pakereng, S.Kom	Pelaksana di Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
5	Yubilate Leba Wadu	Pelaksana di Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
6	Maria Magdalena Fernandez	Pelaksana di Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
IV TIM PENGUATAN TATA LAKSANA				
1.	Yohanes B. W. Dosi Woda, S.IP., M. Kesos	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i> ; - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i> ;
2.	Sarinelda Ester Malmau, S.H	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	- Dst
3.	Sri Hadriani Nababan	Pelaksana pada Sub Bagian	Anggota	

		Keuangan, Umum dan Logistik		
4.	Ramadhani Satrio Wibowo	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
5.	Emanuel Jogo	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
6.	Ongry Nomnafa	Pelaksana pada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
V TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA				
1.	Victor Sar Bally, S.H	Kepala Sub Bagian Parhubmas dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel dan berbasis kompetensi;
2.	Marlince Susana Malo, A.Md	Pelaksana pada Sub Bagian Parhubmas dan SDM	Anggota	- Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi;
3.	Rivaldo Saragih	Pelaksana pada Sub Bagian Parhubmas dan SDM	Anggota	- Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu;
4.	Aditya Reza Dhanny, S.M	Pelaksana pada Sub Bagian Parhubmas dan SDM	Anggota	- Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi

5.	Yosep Umbu Wole, S. Kom	Pelaksana pada Sub Bagian Parhubmas dan SDM	Anggota	pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik; - Dst.
VI TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA				
1.	Efraim Novrihansi Gadi, S.Si	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur;
2.	Adi Afan Asy'ri, S.Kom	Pelaksana di Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	- Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU Kabupaten Sumba Barat Daya; - Dst.
3.	George Reynaldi Koten, S.Kom	Pelaksana di Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
4.	Ferdinand Pakereng, S.Kom	Pelaksana di Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
5.	Yubilate Leba Wadu	Pelaksana di Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
6.	Maria Magdalena Fernandez	Pelaksana di Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	

VII TIM Penguatan Pengawasan				
1.	Kristoforus M. Nggala, S.Sos	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota	- Membangun sistem yang mampu mendorong pengawasan kinerja organisasi yang terukur;
2.	Ahmad Zulfikar Pical, S.H., M.H	Pelaksana pada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	- Dst.
3.	Elton Jordan Ronaldo	Pelaksana pada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
4.	Ilham Agustian Anhas	Pelaksana pada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
5.	Akromul Hakiim Nashuha	Pelaksana pada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
VIII TIM Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik				

1.	Victor Sar Bally, S.H	Kepala Sub Bagian Parhubmas dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik; - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pelayanan publik; - Dst.
2.	Marlince Susana Malo, A.Md	Pelaksana pada Sub Bagian Parhubmas dan SDM	Anggota	
3.	Rivaldo Saragih	Pelaksana pada Sub Bagian Parhubmas dan SDM	Anggota	
4.	Aditya Reza Dhanny, S.M	Pelaksana pada Sub Bagian Parhubmas dan SDM	Anggota	
5.	Yosep Umbu Wole, S. Kom	Pelaksana pada Sub Bagian Parhubmas dan SDM	Anggota	
IX TIM AGEN PERUBAHAN				
1.	Agustinus Damma Renna, S.I.P	Sekretaris KPU Kabupaten Sumba Barat Daya	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat rencana aksi dari program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi; - Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan
2	Yohanes B. W. Dosi Woda, S.I.P., M. Kesos	Plt. Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Wakil Ketua dan Koordinator Perubahan	
3.	Victor Sar Bally, S.H	Kepala Sub Bagian Parhubmas dan SDM	Anggota	
4.	Kristoforus M. Nggala, S.Sos	Kepala Sub Bagian Teknis	Anggota	

		Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum		- Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif.
5.	Efraim Novrihansi Gadi, S.Si	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	

Ditetapkan di Tambolaka
Pada tanggal 29 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA,
ttd
HYRONYMUS MALELAK

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Kristoforus M. Nggala